

**PELAKSANAAN PENGENAAN RETRIBUSI PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
PADA PT. SPA SUKSES PRATAMA KUTA
(STUDI KASUS DI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BADUNG)**

oleh :

I Gst Ngr Agung Septyadi
I Ketut Markeling
I Nyoman Darmadha

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The development of globalization and industrialization is currently encouraging the movement of capital flows and investments into labor aspects, which resulted in the migration or movement of labor between countries. In the district of Badung companies that employ foreign workers, one of them PT.SPA Sukses Pratama. The use of foreign labor in PT.SPA Sukses Pratama assessed with other forms of supervision by the Department of Social and Labor Badung regency, and offset by the imposition of a policy of retribution against the company's funds accompanying foreign workers in every extension of its workforce dedicated to improving the quality of labor Local and regional income. The author examines the form of supervision by the Department of Social Welfare and Labor Badung on the implementation of the imposition of the levy extension of employing foreign labor and the imposition of a levy constraints extension of employing foreign workers on PT.SPA Sukses Pratama using Empirical Juridical method. These results it implementation of the imposition of the levy extension of employing foreign workers at PT. Sukses Pratama by the Department of Labor Social and Badung is based on the approach of preventive and repressive law, namely prevention before the onset cases and follow-up of impact arising from the case based on the form of supervision and implementation of policies imposing certain licensing fees which did not escape from the constraints of adverse local labor and local, as well as legal actions either administrative or criminal worn so that the purpose of the imposition of the levy extention permission to employ foreign labor can be realized in employment activities and regional development.

Keywords: *Supervision Law, Foreign Workers, Levy, License Renewal*

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Di wilayah Kabupaten Badung perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, salah satunya PT.SPA Sukses Pratama. Penggunaan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama

dikaji dengan bentuk-bentuk pengawasan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, serta diimbangi dengan kebijakan pengenaan dana retribusi terhadap perusahaan penyerta tenaga kerja asing disetiap perpanjangan ijin tenaga kerjanya yang ditujukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah. Penulis mengkaji mengenai bentuk pengawasan oleh Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Badung terhadap pelaksanaan pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dan kendala-kendala pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan pengenaan retribusi perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama Kuta oleh Dinas Sosil dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung adalah berdasarkan pendekatan hukum preventif dan represif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kasus dan tindak lanjut dari dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut berdasarkan bentuk pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pengenaan retribusi perijinan tertentu yang tidak luput dari kendala-kendala yang merugikan tenaga kerja lokal dan daerah, serta upaya hukum baik administratif maupun pidana yang dikenakan sehingga tujuan dari pengenaan retribusi perpanjangn ijin mempekerjakan tenaga kerja asing dapat terwujud di dalam aktifitas ketenagakerjaan dan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Pengawasan Hukum, Tenaga Kerja Asing, Retribusi, Perpanjangan Izin

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dalam mewujudkan tertib hukum di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing pada PT.SPA Sukses Pratama Kuta di Kabupaten Badung dalam pembangunan daerah serta meningkatkan mutu tenaga kerja lokal diberlakuka pengenaan retribusi perpanjanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Penerapan peraturan yang mengatur tenaga kerja asing dalam rangka mencegah masuknya tenaga kerja asing illegal dengan pengawasan dalam menciptakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah merupakan suatu keharusan. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan

kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja.¹

Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal.² Menyadari kenyataan yang sejauh ini di Kabupaten Badung yang merupakan salah satu wilayah destinasi warga asing, ditunjang dengan pengaruh globalisasi peradaban manusia saat ini, yang dimana Negara pada umumnya mengharuskan membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Hal inilah yang memungkinkan banyak masuknya Tenaga Kerja Asing yang illegal tanpa Izin serta tidak terjamah keberadaannya oleh pemerintah sehingga dana pungutan retribusi yang masuk menjadi pendapatan asli daerah seharusnya dikenakan menjadi hilang.

1.2 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan pengenaan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada PT.SPA Sukses Pratama oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA oleh Dinas Sosial dan Tenagakerja Kabupaten Badung pada PT. SPA Sukses Pratama.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur – literatur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan skripsi ini.³

¹ G.Karta Sapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, h. 46

² Hesty Hastuti, 2005, *Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, BPHN-Departemen Hukum dan HAM, h.20

³ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.3.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengawasan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Pada PT.SPA Sukses Pratama

Masalah tenaga kerja asing (TKA) ilegal disikapi Pemkab Badung. Menyusul terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Badung membentuk Tim Pengawas Pungutan IMTA yang dilakukan secara Intern. Sering luputnya Pengawasan menjadi sebuah permasalahan. Pengawasan dimulai dari pendataan Tenaga Kerja Asing, pengawasan ke lapangan, pengawasan terhadap pencapaian tujuan pengenaan retribusi perpanjangan IMTA, sampai terealisasinya tujuan pungutan retribusi Perpanjangan IMTA terhadap tenaga kerja lokal dan pembangunan daerah.

2.2.2 Kendala-Kendala Pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA Pada PT.SPA Sukses Pratama Kuta

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam pencapaian tujuan pengenaan retribusi Perpanjangan IMTA pada PT.SPA Sukses Pratama berdasarkan wawancara dengan Ibu Dwi Priatni, Kepala Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yaitu Pertama, kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang sebaiknya melibatkan pihak lintas sektor agar pengawasan terhadap aktifitas tenaga kerja asing lebih meningkat. Kedua, terhambatnya alih ketrampilan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal pada PT.SPA Sukses Pratama sebagai tujuan penggunaan tenaga kerja asing yang diakibatkan faktor bahasa sebagai sarana komunikasi dan masih kurangnya pelatihan yang diberikan tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja lokal yang mengakibatkan kurang mampunya tenaga kerja lokal memahami serta menerima secara optimal pelatihan ketrampilan sebagaimana untuk bekerja secara profesional. Ketiga, besaran nominal pembayaran retribusi yang berjumlah 100 *USD*/bulan yang telah ditentukan tersebut tidak menentu dikarenakan naik turun nilai tukar mata uang *Dollar* Amerika dengan Rupiah yang mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pungutan Retribusi Perpanjangan IMTA ini pengelolaanya baik untuk pengawasan, pembangunan daerah dalam aspek ketenagakerjaan, pembangunan lapangan pekerjaan, fasilitas umum

dan peningkatan mutu tenaga kerja lokal menjadi tidak stabil yang menjadikan hal ini sebagai kendala dalam maksud dan tujuan dari Pengenaan Retribusi Perpanjangan IMTA pada PT.SPA Sukses Pratama oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

III. KESIMPULAN

1. Pengawasan pengenaan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada PT. SPA Sukses Pratama bersifat intern.
2. Kendala-kendala pengenaan retribusi Perpanjangan IMTA pada PT.SPA Sukses Pratama yaitu kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang sebaiknya melibatkan pihak lintas sektor, terhambatnya alih ketrampilan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal pada PT.SPA karena faktor bahasa sebagai sarana komunikasi dan masih kurangnya pelatihan yang diberikan tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja, serta kendala besaran nominal pembayaran retribusi yang berjumlah 100 *USD*/bulan yang telah ditentukan tersebut tidak menentu dikarenakan naik turun nilai tukar mata uang *Dollar* Amerika dengan Rupiah.

Daftar Pustaka

Buku :

G.Karta Sapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

Hesty Hastuti, 2005, *Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, BPHN-Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).